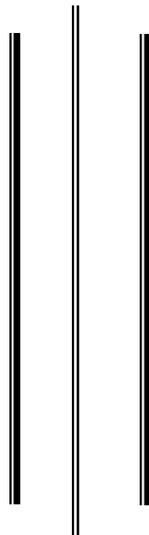




**RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
OPD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KOTA PEMATANGSIANTAR
PROPINSI SUMATERA UTARA**



TAHUN 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penyusunan Renja | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 14 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah..... | 19 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 22 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 29 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 30 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 32 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 33 |
| BAB IV PENUTUP | 48 |

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan BerkatNya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Dokumen Rancangan RENJA tahun anggaran 2024 sistematis penulisan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, namun dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan dan anggaran selama satu tahun. Selain itu dokumen Rancangan Renja juga memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pelaksanaan renja tahun berjalan, serta informasi tentang analisis kinerja pelayanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dokumen Rancangan Renja tahun 2023 masih terdapat kekurangan, Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Dokumen Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar yang telah disusun ini dapat memberikan informasi serta manfaat bagi Kota Pematang Siantar serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran.

Pematang Siantar, Maret 2023

**Kepala dinas kependudukan dan pencatatan
Sipil Kota Pematangsiantar,**



SM.ULINASARI GIRSANG,SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19651217 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar dan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tahun 2024 ini dibuat Merujuk Pada Peraturam Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namun dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri : 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan yang memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra) yang penyusunannya juga ber irisan dengan Penyusunan Renja, dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara

simultan /paralel dengan penyusunan RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
5. Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Nomor 70 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor : Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027;
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dalam penyusunan RKPD Kota Pematang Siantar tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
2. Sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur dalam mewujudkan visi dan misi daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tahun adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum penyusunan dokumen RENJA yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rencana Kerja, Penelaan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Penjelasan tentang Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut, Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan Tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar.

BAB II
EVALUASI PELASANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam konteks manajemen organisasi, Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula cara membandingkan antara output dan input kegiatan, baik untuk rencana maupun realisasi dalam pencapaian kinerja di tahun sebelumnya.

Renja (Rencana Kerja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsian pada tahun 2022 telah terlaksana seluruhnya capaian per masing – masing indikator setiap kegiatan dengan baik dan Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85,86 %

Berikut adalah table realisasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan terhadap Capaian Rensta sebagai berikut :

| Urusan/Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja | | | |
|--|--|--|----------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----|-------|
| | | | | | Kinerja | Realisasi Anggaran | % | |
| | | | | | | | K | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3.304.002 | 3 Dokumen | 2.434.951 | 100 | 100 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 3.658.509.109 | 14 Bulan | 3.077.883.003 | 100 | 84,13 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 3.075.500 | 12 Bulan | 3.075.500 | 100 | 100 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 853.694.293 | 12 Bulan | 812.498.722 | 100 | 95,17 |
| | | Penyediaan | 12 | 42.898.665 | 12 Bulan | 42.898.665 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|----------|---------------|---------------------|---------------|-------|-------|
| | | barang cetakan dan Penggandaan | Bulan | | | | | |
| | | Penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 208.469.800 | 12 Bulan 1 Kegiatan | 205.012.390 | 100 | 98,34 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17 Unit | 240.715.710 | 11 Unit | 127.519.622 | 64,70 | 52,98 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 3.480.000 | 12 Bulan | 3.480.000 | 100 | 100 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik | 12 Bulan | 85.894.584 | 12 Bulan | 73.056.650 | 100 | 85,05 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 475.926.344 | 12 Bulan | 421.986.344 | 100 | 88,67 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatab | 3 Unit | 33.716.850 | 3 Unit | 28.354.250 | 100 | 84,10 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21 Unit | 14.250.000 | 21 Unit | 14.250.000 | 100 | 100 |
| Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 Bulan | 63.800.000 | 12 Bulan | 62.750.000 | 100 | 98,35 |
| JUMLAH | | | | 5.673.484.857 | | 4.860.950.097 | 97,28 | 85,68 |

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah tahun 2022 pada 2 Program 7 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan Anggarn Rp. 5.673.484.857,- dan Realisasi sebesar Rp. 4.860.950.097,- secara keseluruhan sampai kondisi 31 Desember 2022 dimana untuk realisasi capaian kinerja dan Anggaran renja tahun 2022 diperoleh realisasi kinerja 97,28 dan realisasi Keuangan 85,68%

Tabel. 2.2 T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA PEMATANG SIANTAR

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2022) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020) | | | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8(7/6)</i> | <i>9</i> | <i>10(5+7+9)</i> | <i>11(10/4)</i> |
| | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| | BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | |
| 2.06.2.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | |
| 2.06.2.06.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan jasa surat menyurat | 60 Bln | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.01.01 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 Bln | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(7/6) | 9 | 10(5+7+9) | 11(10/4) |
|------------------------|--|--|----------|----|----|----|--------|----|-----------|----------|
| 2.06.2.06.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan Alat Kebersihan Kantor | 60 Bulan | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya Alat Tulis Kantor | 60 Bulan | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak | 60 Bulan | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.06.2.06.01.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi/ Bintek | 60 Bulan | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.01.10 | Penyediaan Jasa Pelayanan THL/PNS Daerah | Penyediaan jasa Pelayanan PNS/THL | 60 Bulan | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| 2.06.2.06.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | 0 | |
| 2.06.2.06.01.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas pegawai | 235 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.1.02.01.03.05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | 235 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| 2.06.2.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | 0 | |
| 2.06.2.06.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Keliling | 3 unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.06.2.06.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 60 Bln | 36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
|------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2.06.2.06.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Terpeliharanya rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | 3 Unit | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2.06.2.06.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.06.2.06.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor | Terpeliharanya rumah gedung kantor | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| 2.06.2.06.01.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | 0 | |
| 2.06.2.06.01.15.01 | Pembangunan SIAK secara terpadu | Terbangunnya dan Pengoprasian SIAK secara terpadu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.06.2.06.01.15.02 | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | 5 Keg | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 1 |
| 2.06.2.06.01.15.15 | Pelayanan Dokumen Kependudukan | Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan | 60 | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.15.16 | Penerbitan Dokumen Kependudukan | Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan | 60 | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.15.17 | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Buku Profil Perkembangan Penduduk dan Data Agregat Penduduk | 60 | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |
| 2.06.2.06.01.15.17 | Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi/ Bintek, Sosialisasi, Rakor/Rakorda Adminduk | 60 | 36 | 12 | 12 | 1 | 12 | 60 | 1 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar yang menyelenggarakan pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar dalam Pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berikut kami sampaikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar seperti pada table dibawah ini :

Tabel T. C. 3.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara

| NO | Indikator | Standart Nasional | IKK | Target Rensta Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Proyeksi | |
|----|---|-------------------|-----|------------------------|---------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio/ Indeks Bayi berakta Kelahiran | | | 67 % | 74,92% | 85,92 % | 87 % | 90,92% | 85 % | 87,26 % | 97,15 % | 92 % | 92,87 | | |
| 2 | Rasio Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan | | | 85 % | 85,92 % | 85,92 % | 86,92 % | 90,92% | 85 % | 87,78 % | 98,50 % | 99 % | 99,26% | | |
| 3 | Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk | | | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | | |
| 4 | Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EI | | | 91 % | 92 % | 93 % | 98 % | 98% | 96 % | 96,73 % | 99 % | 98,07 % | 98,52% | 98,78 | 99,07 |

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui:
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK.
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, Gratis, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll)
6. Untuk menunjang kelengkapan tertib Administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib disiapkan standar Oprasional Prosedur dan Standart Pelayanan.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat adanya permasalahan dan isu-isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa depan.

Terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, ada beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya :

- a. Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat 4 permendagri yang menyatakan data kependudukan dipergunakan untuk semua keperluan yang mana

salah satunya digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan, pemilu menggunakan data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh disdukcapil, permasalahannya selama ini data yang digunakan adalah data dari BPS. Hal ini disebabkan data jumlah penduduk dari BPS dan capil tidak sama.

- b. Pemanfaatan data secara terintegrasi dan online guna mewujudkan single identity number dalam rangka mendorong OPD/Instansi, lembaga Kabupaten/Kota, Provinsi dalam pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dengan DWH terpusat sehingga data kependudukan bisa dipergunakan untuk semua keperluan layanan publik.
- c. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring sesuai permendagri Nomor 7 Tahun 2019 yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- d. Berdasarkan Perpres Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati yaitu hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik digunakan sebagai sumber data utama untuk melakukan perumusan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi programpembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, antara lain :

A. Hambatan Internal

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas atau jumlah Sumber Daya manusia pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Terdapat 2 Jabatan Struktural yang lowong sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
 - c. Perlunya peningkatan kulaitas Sumber Daya Manusia bagi petugas pelayanan.
- 2) Sarana dan Prasarana
 - a. Usia peralatan KTP elektronik sudah di atas 5 (lima) tahun sedangkan penggunaannya setiap hari (porsir) sehingga rentan terjadinya kerusakan.

- b. Sudah habisnya masa garansi peralatan KTP elektronik oleh Kemetrian Dalam Negeri, sementara anggaran APBD terbatas sehingga menyebabkan pemeliharaan terbatas juga.
- c. Belum adanya mobil Operasional untuk digunakan dalam Pelayanan Keliling jemput bola.

B. Hambatan External

1. Penyebaran corona virus Disease (Covid) 2019 sehingga mempengaruhi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pematangsiantar dalam mengurus akta-akta Pencatatan sipil khususnya akta kematian yang masih dianggap kurang penting bagi sebagian besar masyarakat
3. Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum/tidak memiliki surat nikah/ Akta Nikah sehingga dalam penerbitan akta kelahiran anak tersebut tertera anak dari seorang ibu, bukan dari ayah dan ibu
4. Masih terdapat masyarakat yang belum paham tentang peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang terbaru.

Dengan adanya beberapa hambatan dan permasalahan yang sering ditemui didalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar memandang bahwa permasalahan dan hambatan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara :

- 1) Melaksanakan Pelayanan Adminduk seperti Kartu Keluarga, Pencetakan KTP, Penerbitan Surat Pindah dan Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil secara online melalui Situs online atau Website terpadu di alamat **[Http/siantar.dukcapil.online](http://siantar.dukcapil.online)**
- 2) Melakukan Koordinasi dan meminta penambahan ASN ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar
- 3) Usulan Penambahan sarana/prasarana yang sangat dibutuhkan oleh kantor, serta peremajaan peralatan yang usia pemanfaatannya sudah cukup lama.
- 4) Melakukan Pelayanan Keliling (Jemput Bola) dengan melakukan Perekaman KTP-EL di Sekolah dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kelurahan.
- 5) Mengadakan sosialisasi secara terus menerus mengenai Peraturan-peraturan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan petugas pengumpul/pelapor data kependudukan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pelayanan keliling kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil.

- 8) Melakukan Kerjasama dengan OPD, Lembaga dan Instansi lain dalam pemanfaatan data Kependudukan.
- 9) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan tentang kependudukan dan pencatatan sipil yang terbaru.

2.4 Review terhadap RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dapat dilihat dalam Tabel T.C.31 berikut ini :

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | | | |
|----|--|-------------|---|----------------|--------------------|--|-------------|---|----------------|--------------------|----|
| | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 99,36 | 578.474.000 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 99,36 | 578.142.000 | |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang terlayani | 40.740 | 434.974.000 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang terlayani | 47.180 | 441.642.000 | |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Disdukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 100 Dokumen | 13.332.000 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Disdukcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 100 Dokumen | 20.000.000 | |
| | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 17.850 Dokumen | 342.052.000 | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 40.700 Dokumen | 342.052.000 | |
| | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 79.590.000 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 79.590.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|---------------|-------------------|---|--------------|--|---------------|--------------------|--|
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 136.500.000 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 136.500.000 | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 1000 Dokumen | 99.750.000 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 1000 Dokumen | 99.750.000 | |
| | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 36.750.000 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 36.750.000 | |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | Persentase Cakupan Pencatatan Sipil | 92,92 | 85.850.000 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | Persentase Cakupan Pencatatan Sipil | 92,92 | 105.050.000 | |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | | Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang terlayani | 8.931 | 50.800.000 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang terlayani | 8.931 | 70.000.000 | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 8.931 Dokumen | 26.250.000 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 8.931 Dokumen | 35.000.000 | |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Disdu kcapil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layannan | 24.550.000 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Disdu kcapil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layannan | 35.050.000 | |
| | Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 35.050.000 | Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 35.050.000 | |
| | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Disdu capil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 35.050.000 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 35.050.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|-------------------|-------------------|---|--------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | Persentase Pemenuhan Permintaan data Kependudukan | 100% | 61.610.000 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | Persentase Pemenuhan Permintaan data Kependudukan | 100% | 61.610.000 | |
| | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan | | Jumlah Laporan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan data Kependudukan | 12 Laporan | 61.610.000 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan | | Jumlah Laporan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan data Kependudukan | 12 Laporan | 61.610.000 | |
| | Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 24 Dokumen | 36.580.000 | Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 24 Dokumen | 36.580.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kerjasama pemanfaatan data kependudukan | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 5 Dokumen/ OPD | 25.030.000 | Kerjasama pemanfaatan data kependudukan | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 5 Dokumen/ OPD | 25.030.000 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan | 100% | 45.450.000 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan | 100% | 45.450.000 | |
| | Penyusunan Profil Kependudukan | | Jumlah Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya yang terpenuhi | 100 Dokumen/ Buku | 45.450.000 | Penyusunan Profil Kependudukan | | Jumlah Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya yang terpenuhi | 100 Dokumen/ Buku | 45.450.000 | |
| | Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 100 DOKUMEN | 45.450.000 | Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 100 DOKUMEN | 45.450.000 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------|--|-----------------------|------------------|--|
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Capaian Akip Perangkat Daerah | B | 5.000.903.186 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Capaian Akip Perangkat Daerah | B | 4.571.994.776 | |
| | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | <u>6.300.000</u> | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | <u>6.300.000</u> | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 6.300.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Disdu kcapil | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 6.300.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Cakupan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 3.458.501.759 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Cakupan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 3.562.951.275 | |
| | Penyediaan Gaji dan TunjanganASN | Disdu kcapil | Jumlah Bulan/ Jumlah ASN yang menerima gaji | 34 Orang. 14 Bulan | 3.458.501.759 | Penyediaan Gaji dan TunjanganASN | Disdu kcapil | Jumlah Bulan/ Jumlah ASN yang menerima gaji | 34 Orang. 14 Bulan | 3.562.951.275 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Dokumen Umum Perangkat Daerah | 100 | 260.150.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Dokumen Umum Perangkat Daerah | 100 | 315.839.800 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Disdu kcapil | jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4.200.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Disdu kcapil | jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 10.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disdu kcapil | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 60.800.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disdu kcapil | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 60.800.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Disdu kcapil | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 45.150.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Disdu kcapil | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 45.150.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|------------|-------------|---|--------------|--|------------|-------------|--|
| | Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26 Laporan | 150.000.000 | Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26 Laporan | 199.889.800 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 700.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 210.401.790 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Disdu kcapil | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Disdu kcapil | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disdu kcapil | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Jenis | 200.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disdu kcapil | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Jenis | 210.401.790 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 | 414.531.911 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 | 414.531.911 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 6.474.838 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 6.474.838 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 82.851.073 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 82.851.073 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 325.206.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Disdu kcapil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 325.206.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Cakupan Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan | 100 | 56.970.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Cakupan Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan | 100 | 61.970.000 | |

| | | | Daerah | | | | | Daerah | | | |
|--|---|--------------|--|---------|------------|---|--------------|--|---------|------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Disdu kcapil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 36.970.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Disdu kcapil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 36.970.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disdu kcapil | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disdu kcapil | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 25.000.000 | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Disdu kcapil | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Disdu kcapil | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dalam urusan administrasi kependudukan dituangkan dalam kebijakan Renstra Ditjenduk Capil tahun 2020-2024, dimana program prioritas presiden 2020-2024 tertuang dalam sasaran strategis kemendagri, Ada 5 program prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Reformasi Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Output sasaran Strategis Kemendagri dari Program tersebut :

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Prasarana
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Reformasi Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi
- f. Pembinaan Stabilitas Politik Dalam Negeri
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa
- h. Pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public
- i. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah
- j. Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan output/sasaran strategis kemendagri tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mangacu pada sasaran point h yaitupemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil :

1. Pembangunan SDM : meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
2. Pembangunan infrastruktur : mewujudkan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah
3. Penyederhanaan regulasi : terwujudnya regulasi menuju single identity number
4. Pemanfaatan data kependudukan : terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berbasis digital dan tingkat kepuasan masyarakat yang memadai.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun 2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2024 |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | B 77,61 |
| | | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata rata Cakupan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Akta Capil | 99,07 |
| | | | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. | 45 % |

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana dan Program merupakan salah satu langkah implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merencanakan 5 Program dengan 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di sesuaikan dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri : 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Daftar program dan kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun 2024 dan prakiraan maju 2025 dapat dilihat pada Tabel T.C.33 berikut ini

TABEL TC. 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2024 (N) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|----|----|------|----|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| -1 | | | | | -2 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 2 | 12 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 5.362.246.776 | | | | | 5.561.083.561 |
| 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk | | 99,36% | 578.142.000 | | | 100% | 577.172.580 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Capaian Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | 99% | 441.642.000 | | | 100% | 433.847.580 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Disdukcapil | 100 Dokumen | 20.000.000 | DAU APBD | | 100 Dokumen | 6.660.000 |

| -1 | | | | | -2 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
|----|----|----|------|----|---|--|-------------|----------------|-------------|----------|----|----------------|-------------|
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 02 | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | 17.850 Dokumen | 342.052.000 | DAU APBD | | 44.915 Dokumen | 343.618.080 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil | 12 Laporan | 79.590.000 | DAU APBD | | 12 Laporan | 83.569.500 |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | 12 Laporan | 136.500.000 | | | 100% | 143.325.000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 02 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil | 1000 Dokumen | 99.750.000 | DAU APBD | | 1000 Dokumen | 104.737.500 |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil | 1 Laporan | 36.750.000 | DAU APBD | | 1 Laporan | 38.500.000 |
| 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil | | 94,3 | 105.050.000 | | | 93,84 | 105.085.500 |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Layanan Pencatatan Sipil | | 10.337 | 70.000.000 | | | 100% | 70.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| -1 | | | | | -2 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
|----|----|-----|------|----|---|---|-------------|---------------|------------|----------|----|---------------|------------|
| 2 | 12 | '03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan atas pelaporan peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | | 8931 Dokumen | 35.000.000 | | | 9.845 Dokumen | 35.000.000 |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Disdukcapil | 1 Layannan | 35.000.000 | | | 1 Layanan | 35.000.000 |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | | 1 Laporan | 35.050.000 | | | 100% | 35.085.500 |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 08 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | Disdukcapil | 1 Laporan | 35.050.000 | DAU APBD | | 1 Laporan | 35.085.500 |
| 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 100% | 61.610.000 | | | 100% | 62.226.100 |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan | Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan | | 12 Laporan | 61.610.000 | | | 100% | 62.226.100 |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Disdukcapil | 12 Laporan | 36.580.000 | DAU APBD | | 12 Laporan | 37.176.800 |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Kerjasama pemanfaatan data kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Disdukcapil | 5 Dokumen/OPD | 25.030.000 | DAU APBD | | 5 OPD | 25.049.300 |

| -1 | | | | | -2 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
|----|----|----|------|----|---|---|-------------|--------------------|---------------|----------|----|--------------------|---------------|
| 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan | | 100% | 45.450.000 | | | 100% | 45.904.500 |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | | 100 DOKUMEN | 45.450.000 | | | 100 DOKUMEN | 45.904.500 |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | Disdukcapil | 100 DOKUMEN | 45.450.000 | DAU APBD | | 100 Buku | 45.904.500 |
| x | xx | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capian Nilai Akip | B | 100% | 4.571.994.776 | | | B | 4.896.528.222 |
| x | xx | 01 | 2.01 | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | 6.300.000 | | | 100% | 6.615.000 |
| x | xx | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Disdukcapil | 2 Dokumen | 6.300.000 | DAU APBD | | 2 Dokumen | 6.615.000 |
| x | xx | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Keuangan perangkat daerah | | 100% | 3.562.951.275 | | | 100% | 3.662.951.275 |
| x | xx | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan TunjanganASN | Jumlah Bulan/ Jumlah ASN yang menerima gaji | Disdukcapil | 34 Orang. 14 Bulan | 3.562.951.275 | DAU APBD | | 34 Orang. 14 Bulan | 3.662.951.275 |

| -1 | | | | | -2 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
|----|----|----|------|----|--|--|-------------|------------|-------------|----------|----|------------|-------------|
| x | xx | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen umum perangkat daerah | | 100% | 315.839.800 | | | 100% | 327.000.000 |
| x | xx | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Disdukcapil | 4 Paket | 10.000.000 | DAU APBD | | 4 Paket | 12.000.000 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Disdukcapil | 4 Paket | 60.800.000 | DAU APBD | | 4 Paket | 65.000.000 |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Disdukcapil | 4 Paket | 45.150.000 | DAU APBD | | 4 Paket | 50.000.000 |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Disdukcapil | 26 Laporan | 199.889.800 | DAU APBD | | 26 Laporan | 200.000.000 |
| x | xx | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 210.401.790 | | | 100% | 250.000.000 |
| x | xx | 01 | 2.07 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang disediakan | | | | | | | |
| x | xx | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Disdukcapil | 6 Jenis | 210.401.790 | DAU APBD | | 6 Jenis | 250.000.000 |

| -1 | | | | | -2 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
|----|----|----|------|----|---|--|------------|------------|-------------|----------|----|------------|-------------|
| x | xx | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100% | 414.531.911 | | | 100% | 447.158.506 |
| X | XX | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Disdukcapi | 12 Laporan | 6.474.838 | DAU APBD | | 12 Laporan | 8.698.579 |
| X | XX | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Disdukcapi | 4 Laporan | 82.851.073 | DAU APBD | | 4 Laporan | 86.993.627 |
| X | XX | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Disdukcapi | 12 Laporan | 325.206.000 | DAU APBD | | 12 Laporan | 351.466.300 |
| x | xx | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 61.970.000 | | | 100% | 66.970.000 |
| x | xx | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Disdukcapi | 3 Unit | 36.970.000 | DAU APBD | | 3 Unit | 36.970.000 |
| x | xx | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Disdukcapi | 20 Unit | 25.000.000 | DAU APBD | | 20 Unit | 30.000.000 |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2024**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | | | | | | 5.362.246.776,00 | | | | | | | | 5.551.083.461,00 | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5.362.246.776,00 | | | | | | | 5.551.083.461,00 | | |
| | 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 5.362.246.776,00 | | | | | | | 5.551.083.461,00 | | |
| 1. | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | - | 4.571.994.776,00 | | | | | | - | 4.760.694.781,00 | | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.300.000,00 | | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 6.615.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 6.615.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 6.300.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 6.615.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.562.951.275,00 | | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 3.662.951.275,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34/14 Orang/bulan | 3.562.951.275,00 | - Kota Pematang siantar, Siantar Marihat, Pardamean | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 3.662.951.275,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 315.839.800,00 | | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 327.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 12.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 60.800.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 65.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 45.150.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 50.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 26 Laporan | 199.869.800,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 210.401.790,00 | | | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | - | 250.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 210.401.790,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 250.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 414.531.911,00 | | | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | - | 447.158.506,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 6.474.836,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 8.698.579,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 82.851.073,00 | - Kota Pematang siantar, Siantar Marihat, Pardamean | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 86.993.627,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 325.206.000,00 | - Kota Pematang siantar, Siantar Marihat, Pardamean | - | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 351.466.300,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 61.970.000,00 | | | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | - | 66.970.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 36.970.000,00 | - Kota Pematang siantar, Siantar Marihat, Pardamean | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 36.970.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 25.000.000,00 | - Kota Pematang siantar, Siantar Marihat, Pardamean | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 30.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 2. | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - | - | | | - | 578.142.000,00 | | | | | | - | 577.172.580,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | - | | | - | 441.642.000,00 | | | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 433.847.580,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | 100 Dokumen | 20.000.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 6.660.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | 40.700 Dokumen | 342.052.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 343.618.080,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 12 Laporan | 79.590.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 83.569.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | - | | | - | 136.500.000,00 | | | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 143.325.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 1000 Dokumen | 99.750.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 104.737.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | 1 Laporan | 36.750.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 38.587.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 3. | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | - | - | | | - | 105.050.000,00 | | | | | | - | 105.085.500,00 | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan inovatif Meningkatkan akuntabilitas kinerja | - | - | 70.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | 8931 Dokumen | 35.000.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif Meningkatkan akuntabilitas kinerja | - | | 35.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | | | | 1 Layanan | 35.000.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 35.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | - | | | - | 35.050.000,00 | | | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 35.085.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | | | | 1 Laporan | 35.050.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 35.085.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 4. | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | - | - | | | - | 61.610.000,00 | | | | | | - | 62.226.100,00 | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | - | | | - | 61.610.000,00 | | | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 62.226.100,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | 24 Dokumen | 36.580.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 37.176.800,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | 5 Dokumen | 25.030.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | | 25.049.300,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 5. | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | - | - | | | - | 45.450.000,00 | | | | | | - | 45.904.500,00 | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | - | - | | | - | 45.450.000,00 | | | - | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | - | - | 45.904.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun</i> | | | | 100 Dokumen | 45.450.000,00 | - Kota Pematang siantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatn ya akuntabi litas kinerja | - | | 45.904.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | | 5.551.083.461,00 | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan (RKPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dalam menyempurnakan Rencana (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk Tahun disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dan usulan yang disampaikan Bidang-Bidang yang ada di Dinas, berikut ini kami sampaikan Program yang akan di laksanakan Tahun seperti :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Pendanaan

Rencana Pendanaan untuk Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Berikut lampiran yang memuat Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran :

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | | | | | 2 | 6 | 7 |
| 2 | 12 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.362.246.776 | |
| 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 578.142.000 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 441.642.000 | DAU |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 20.000.000 | DAU |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 02 | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk | 342.052.000 | DAU |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 79.590.000 | DAU |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 136.500.000 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 02 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk | 99.750.000 | DAU |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 36.750.000 | DAU |

| 1 | | | | | 2 | 6 | 7 |
|---|----|----|------|----|---|---------------|-----|
| 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 105.050.000 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | 70.000.000 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan atas pelaporan peristiwa Penting | 35.000.000 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 35.000.000 | DAU |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL | 35.050.000 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 08 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 35.050.000 | DAU |
| | | | | | | | |
| 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 61.610.000 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan | 61.610.000 | DAU |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan | 36.580.000 | DAU |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 25.030.000 | DAU |
| 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 45.450.000 | |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | 45.450.000 | |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 45.450.000 | DAU |
| | | | | | | | |
| x | xx | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.571.994.776 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.01 | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.300.000 | |
| x | xx | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.300.000 | |
| | | | | | | | DAU |
| x | xx | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.562.951.275 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan TunjanganASN | 3.562.951.275 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 315.839.800 | |
| x | xx | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60.800.000 | DAU |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 45.150.000 | DAU |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD | 199.889.800 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 210.401.790 | |
| x | xx | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 210.401.790 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 414.531.911 | DAU |
| X | XX | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.474.838 | DAU |
| X | XX | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | 82.851.073 | DAU |

| 1 | | | | | 2 | 6 | 7 |
|---|----|----|------|----|---|-------------|-----|
| X | XX | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 325.206.000 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 61.970.000 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.970.000 | DAU |
| x | xx | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000 | DAU |

BABV.
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai tahun anggaran 2024.

Keberhasilan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini tidak hanya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dari lintas sektoral, lintas OPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk masyarakat dengan segala elemen yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal serta database kependudukanyang akurat.

5.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengacu pada alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan serta penyediaan pagu APBD.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Pematang Siantar, Maret 2023

**Kepala dinas kependudukan dan pencatatan
Sipil Kota Pematangsiantar,**

SM.ULINASARI GIRSANG,SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19651217 199311 2 001



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Melanthon Siregar No.36 Telp. (0622) 25300
P E M A T A N G S I A N T A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 400.12.1/ 342/ Disdukcapil 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Nomor 01 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUNAN 2024**
- KESATU** : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, Melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen rencana kerja 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal, Maret 2023

**Kepala dinas kependudukan dan pencatatan
Sipil Kota Pematangsiantar,**



SM.ULINASARI GIRSANG,SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19651217 199311 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 400.12.1/ 342/ Disdukcapil 2023
TANGGAL : Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Dinas | Penanggungjawab |
| 2. | Sekretaris | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Bidang PIAK | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Wakil Ketua |
| 6. | Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan | Wakil Ketua |
| 7. | Mangarajim Gultom, SE/ Perencana Ahli Muda | Sekretaris |
| 8. | Kasubbag Keuangan | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Sofiani Riviera Sinaga, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 11. | Jarsaman Saragih, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 12. | Elisa Hotma Rugun Turnip, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 13. | Mangatur Hutajulu, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 14. | Rubiati, SH/ Operator SIMDA | Anggota |
| 15. | Erika Rosmawati Silalahi, A.Md/ Operator Komputer | Anggota |

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan
Sipil Kota Pematangsiantar,



SM.ULINASARI GIRSANG,SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19651217 199311 2 001

